

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG TERHADAP EKISTENSI DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP)
Dalam Bidang Ilmu Perpustakaan

Oleh:

OKTIN YULISTA
NIM. 1534400055

**PROGAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

NOMOR :B.1372 /Un.09 /IV.1/PP.01 /08/2021

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP
EKSISTENSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

OKTIN YULISTA
NIM. 1534400055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Juni 2021

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Bety, S.Ag., M.A
NIP. 19700421 199903 2 003

Sekretaris

Wahfuuddin Rahmad Harahap, S.Pd., M.A
NIP. 19951030 202012 1 016

Pembimbing I

Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Penguji I

Bety, S.Ag., M.A
NIP. 19700421 199903 2 003

Pembimbing II

Misroni, S.Pd., M.Hum
NIP. 19830203 201403 1 001

Penguji II

Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I
NIP. 19701123 199803 1 005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP)
Tanggal, 30 Agustus 2021

**Dekan
Fakultas Adab dan
Humaniora**

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005

**Ketua Program Studi
Ilmu Perpustakaan**

Yanto, M.Hum., M.IP
NIP. 19770114 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi yang disusun oleh:

Nama : Oktin Yulista
Nim : 1534400055
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Yang Berjudul : **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Pada tanggal, 4 Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP.19701114 200003 1 002

Pembimbing II,



Misroni, S.Pd., M.Hum.
NIP. 19830203 201403 1 001

Lampiran : Surat keterangan bebas plagiarisme



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU PERPUSTAKAAN
<http://ip.adab.radenfatah.ac.id>

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 0110/SKBP/VI/2021

Tim Verifikator Smilarity Skripsi Prodi Ilmu Perpustakaan menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Oktin Yulista
NIM	: 1534400055
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Ilmu Perpustakaan

Knowledge, Quality & Integrity

Judul Skripsi:

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Dinyatakan sudah memenuhi syarat dengan similarity 23% sehingga memenuhi batas maksimal plagiasi kurang dari 25% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian munaqosah.

Link Validasi Hasil Tes Similarity (<http://bit.ly/similarityskripsi>)

Palembang 20 Juni 2021
Verifikator

Budhi Santoso, M.A
NIP.198406152018011002

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Oktin Yulista

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : **PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP EKSISTENSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Oktin Yulista
Nim : 1534400055
Prodi : Ilmu Perpustakaan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 04 Juni 2021
Pembimbing I



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Oktin Yulista

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : **PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP EKSISTENSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Oktin Yulista
Nim : 1534400055
Prodi : Ilmu Perpustakaan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 04 Juni 2021
Pembimbing II



Misroni, S.Pd., M.Hum.
NIP. 19830203 201403 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap menanggung sanksi dari fakultas dan dicabut gelar kesarjanaan saya.

Palembang, 21 Juni 2021

Yang menyatakan,



Oktin Yulista
NIM. 1534400055

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas Akademika Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Oktin Yulista
NIM	: 1534400055
Program Studi	: Ilmu Perpustakaan Fakultas
Fakultas	: Adab dan Humaniora
Jenis Karya	: Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang **Hak Bebas Royalti Non- Exclusive (Exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul: **Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang**, beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti *Non-exclusive* ini maka UIN Raden Fatah Palembang berhak untuk menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap dicantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Di buat di : Palembang
Pada tanggal : 21 Juni 2021
Yang menyatakan,



Oktin Yulista
NIM 1534400055

MOTTO DAN DEDIKASI

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar-ra’d : 11)

“Tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih”. (Buya Hamka)

Hasil skripsi ini saya dedikasikan kepada:

- ❖ Allah SWT yang selalu memberikan cinta, kemudahan disetiap kesulitan, kesabaran dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayah (Marpin) dan Ibu (Martini) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan ayah dan ibu.
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang (Deo Adrian, Orin Dianti dan Amel Salsabilla) terima kasih untuk dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan dan selalu mewarnai perjuanganku menggapai impian.
- ❖ Orang terkasih (Reza Gunarto, Amd., T) dan sahabat-sahabat terbaikku grup gadis cindo (Inda Sawitri, S.Pd, Riski, Widia, Resa, Neza Plouna Iftita Ilmi, S.E) terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti.
- ❖ Almamater biru kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta parasahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*". Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua yang telah membantu. Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku tersayang Marpin, dan ibuku tersayang Martini yang tiada henti mendo'akan, membesarkan, menguatkan, mendidik, membimbing, memberikan nasehat dan bekal pengalaman hidup, serta dukungan, kasih sayang dan segalanya yang tulus sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang..
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
4. Bapak Yanto, M.Hum., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Bapak Misroni, S.Pd., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Perpustakaan, karena kalian telah memberikan dan mengurus segala urusan baik itu akademis sampai urusan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A, selaku dosen pembimbing I yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sejak awal penulisan skripsi.
6. Bapak Misroni, S.Pd., M.Hum, selaku dosen pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, senyuman dan kesabaran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sejak awal penulisan skripsi.
7. Bapak Ir. H. Gunawan, MT, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang serta seluruh staff perpustakaan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Yanto, M.Hum., M.IP selaku dosen Pembimbing Akademik dari Tahun 2015- hingga sekarang yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Saudara-saudaraku Deo Adrian, Orin Dianti dan Amel Salsabilla yang selalu memberikan semangat dan motivasi disetiap harinya.
11. Teman-teman seperjuangan program studi ilmu perpustakaan angkatan 2015. Terkhusus keluarga besar 15 Perpustakaan B yang telah mengukir

cerita, suka, duka, canda dan tawa selama masa perkuliahan dan semoga selamanya.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar pada penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'ailaikum Wr. Wb

Palembang, 21 Juni 2021
Penulis,



Oktin Yulista
NIM. 1534400055

ABSTRAK

Nama : Oktin Yulista
NIM : 1534400055
Fakultas : Adab dan Humaniora
Program Studi/Tahun : Ilmu Perpustakaan/2021
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.
xvii + 82 hal + lampiran

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2) mengetahui eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, serta 3) mengetahui pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data menyatakan bahwa Kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi perpustakaan antara lain yaitu : sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang masih kekurangan tenaga pustakawan, sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung kegiatan perpustakaan walaupun masih ada kekurangan yang harus dilengkapi, dana berasal dari APBD dan APBN, pengguna perpustakaan mengalami perubahan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mempertahankan eksistensi perpustakaan dengan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap perpustakaan tersebut dan memberikan bantuan materi ataupun moril.

Kata Kunci: *kebijakan pemerintah, eksistensi perpustakaan.*

ABSTRACT

Name : Oktin Yulista
NIM : 1534400055
Faculty : Adab and Humanities
Study Program/Years : Library Science/2021
Thesis Title : The Influence of Palembang City Government Policies
On The Existence of the Palembang City Archives and
Library Service.
xv + 82 p + Appendix

This thesis examined the influence of Palembang City Government Policy on the existence of the Palembang City Archives and Library Service. This study aims to 1) determine the policy of the Palembang City Government towards the Palembang City Archives and Library Service, 2) find out the existence of the Palembang City Archives and Library Service, and 3) find out the influence of the Palembang City Government Policy on the Existence of the Palembang City Archives and Library Service. This study uses a qualitative research type. Methods of data collection in this study consisted of observation, interviews and documentation. Based on the results of data analysis, it is found out that Palembang City government's policy towards the Office of Archives and Libraries of Palembang City is the Regulation of the Mayor of Palembang City of Palembang Number 64 Year 2016. It was also found that influence the existence of libraries, including: human resources of the Office of Archives and Libraries The city of Palembang still lacks librarians, facilities and infrastructure are adequate to support library activities although there are still shortcomings that must be completed, funds come from the APBD and APBN, library users experience changes in the number of visitors every year. The result also showed that the government has a very important influence in maintaining the existence of the library by determining policies towards the library and providing material or moral assistance.

Keywords: *government policy, library existence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
MOTO DAN DEDIKASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Definisi Konsepsional	11
H. Definisi Operasional	13
I. Tinjauan Pustaka	14
J. Metodologi Penelitian.....	17
K. Rencana Penelitian	21
L. Sistematika Penulisan	22

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perpustakaan.....	24
B. Pengertian Perpustakaan Umum	25
1. Ciri Perpustakaan Umum	26
2. Fungsi Perpustakaan Umum	26

3. Tujuan Perpustakaan Umum	27
C. Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik).....	28
1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	30
2. Proses Kebijakan Publik	31
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik	33
4. Kebijakan Tentang Perpustakaan	34
D. Eksistensi Perpustakaan.....	34
1. Ciri-ciri Eksistensi	36
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Perpustakaan	37
BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang	43
B. Letak dan Tata Ruang Perpustakaan	46
C. Visi, Misi dan Tujuan	46
D. Struktur Organisasi.....	47
E. Fasilitas Perpustakaan	50
F. Sumber Daya Manusia	51
G. Layanan Perpustakaan	54
H. Tata Tertib Pengunjung Perpustakaan.....	56
I. Dana Operasional Perpustakaan.....	56
BAB IV: TEMUAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang	53
B. Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang	63
C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang	73
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR RUJUKAN	79
BIODATA PENULIS.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia.....	4
Tabel 1.2 Rekap Pengunjung Perpustakaan	5
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana	50
Tabel 1.4 Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	52
Tabel 1.5 Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.....	53
Tabel 1.6 Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 1.7 Data Rekap Pengunjung Perpustakaan Umum	69
Tabel 1.8 Data Rekap Pengunjung Mobil Perpustakaan Keliling	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Keterangan (SK) Pembimbing.....	85
2. Lampiran Lembar Konsultasi Pembimbing 1.....	86
3. Lampiran Lembar Konsultasi Pembimbing 2.....	88
4. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	90
5. Lampiran Surat Balasan.....	91
6. Lampiran Pedoman Wawancara.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era informasi setiap individu menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupannya, mereka berusaha mencari informasi melalui berbagai macam media yang tersedia, baik cetak maupun elektronik. Untuk itu diperlukan suatu lembaga informasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan informasi.

Berbicara mengenai informasi tentunya tidak dapat terlepas dengan eksistensi suatu perpustakaan karena melalui perpustakaan setiap orang dapat memperoleh informasi dengan mudah dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.² Adapun jenis perpustakaan diantaranya perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan sebagainya.³ Dari semua jenis perpustakaan ini hanya perpustakaan umum yang langsung melayani masyarakat umum karena perpustakaan ini terbuka untuk umum.

¹Amaliah, "Upaya Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Umum Daerah Kota Tangerang", *Skripsi* (Jakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 2

²Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

³Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 45-50

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat umum, tanpa membedakan usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi, perpustakaan umum melayani seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Perpustakaan berfungsi menyimpan hasil karya manusia berupa karya cetak dan karya rekam yang dapat didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penelusuran dan rekreasi.⁴

Perpustakaan umum memiliki peran penting bagi kecerdasan bangsa sehingga UNESCO mengeluarkan pernyataan tentang perpustakaan umum pada tahun 1972 yang menyatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai empat tujuan utama yaitu: memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, bertindak selaku agen kultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya.⁵

Supaya dapat melaksanakan peran dan fungsi di atas, perpustakaan umum tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: [1] menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, [2] menjamin ketersediaan layanan

⁴ Taslima Yusuf, *Manajemen Perpustakaan Umum*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1997), hlm. 2

⁵ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, hlm. 46-47

perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, [3] menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, [4] menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, [5] memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, [6] menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.⁶

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintah Kota Palembang khususnya dalam bidang kearsipan dan perpustakaan yakni menyangkut pembinaan, penataan, pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah, swasta, BUMD dan masyarakat dalam lingkungan pemerintah Kota Palembang serta menumbuhkembangkan minat berkunjung pemustaka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang memiliki berbagai layanan perpustakaan seperti layanan sirkulasi, layanan perpustakaan keliling, layanan referensi, layanan baca anak, layanan dongeng anak. Sejauh ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sudah memberikan pelayanan secara maksimal kepada pengguna perpustakaan. Akan tetapi, perpustakaan ini masih harus membenahi pelayanan di perpustakaan untuk kepentingan pengguna perpustakaan.

⁶Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Saat ini keberadaan dan kondisi perpustakaan ini masih memprihatinkan, baik dari segi sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana yang ada, hal ini menyebabkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang tersebut belum ramai yang mengunjungi dan memanfaatkan koleksi serta fasilitas yang dimiliki perpustakaan tersebut, sehingga pemustakanya terlihat sepi.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang

STATUS	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	SMP	SMA	D III	S1	S2	
PNS	1 Orang			6 Orang	4 Orang	11 Orang
NON PNSD		2 Orang		5 Orang		7 Orang
PNS PUSTAKAWAN			2 Orang			2 Orang
NONPNSD PUSTAKAWAN				1 Orang		1 Orang
TOTAL PEGAWAI BIDANG PERPUSTAKAAN						21 ORANG

Sumber: Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat kondisi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang hanya memiliki dua orang PNS pustakawan dan satu orang NONPNSD pustakawan. Hal ini menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang masih terbilang sedikit.

Tabel 1.2
Rekap Pengunjung Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang Tahun 2019

No	Bulan	Tahun 2019
1	Januari	446 orang
2	Februari	372 orang
3	Maret	394 orang
4	April	413 orang
5	Mei	354 orang
6	Juni	265 orang
7	Juli	471 orang
8	Agustus	391 orang
9	September	362 orang
10	Oktober	268 orang
11	November	206 orang
12	Desember	200 orang
	Jumlah rata-rata	345 orang

Sumber: Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019

Tabel 1.2 menunjukkan perubahan jumlah pengunjung setiap bulannya. Perubahan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pengunjung yang tidak stabil, dari data di atas yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada bulan januari, maret, april dan juli. Sedangkan data jumlah kunjungan yang mengalami penurunan yaitu pada bulan februari, mei, juni, agustus, september, oktober, november dan desember. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang memiliki syarat sebagai berikut:

a. Kunjungan Per Kapita Per Tahun

Jumlah kunjungan fisik per kapita per tahun sekurang-kurangnya 0,55 (jumlah kunjungan pertahun atau jumlah penduduk).

b. Jumlah Tenaga Berkualifikasi

Jumlah tenaga perpustakaan (staf) yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang per 15.000 penduduk di wilayah kewenangan.⁷

Eksistensi (keberadaan) perpustakaan artinya adanya, kedudukannya, posisinya diakui dan digunakan. Suatu yang bertahan hidup, dengan demikian terlaksananya suatu sistem dan mekanisme manajemen perpustakaan. Keberadaannya bukan sekedar statis dan pasif tanpa adanya aktifitas yang nyata. Mesti ada dan hidup, harus dinamis dan aktif dalam mengembangkan berbagai kegiatan perpustakaan. Bila dilihat dari sisi dalam organisasi kegiatan yang aktif dan dinamis itu seperti pembinaan pengembangan sumber daya manusia, sumber koleksi, kelembagaan, sarana dan prasarana, layanan informasi, peningkatan kemampuan keterampilan pengelola, dan lainnya. Kegiatan tersebut mencakup transaksi informasi, sirkulasi koleksi, pemanfaatan, kunjungan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya transfer informasi dari sumbernya di perpustakaan kepada pemakai yang dilakukan pengunjung perpustakaan.⁸

⁷ Standar Nasional Perpustakaan (SNP), Perpustakaan Nasional RI 2011.

⁸ Nurjannah, "Eksistensi Perpustakaan dalam Melestarikan Khazanah Budaya Bangsa". *Jurnal Libria*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 162-163, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan).⁹ Kota ini memiliki perpustakaan kota yang terbuka untuk umum yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dan khusus Bidang Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah. Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai tugas pokok, kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi tentang Kearsipan dan Perpustakaan.

Sedikit uraian di atas dapat dilihat bahwa peran pemerintah kota sangat besar terhadap perkembangan perpustakaan umum di daerahnya terutama dalam hal memberikan dukungan materi berupa pengalokasian dana khusus untuk pengelolaan perpustakaan. Hal inilah yang kiranya dapat mendorong perlunya pemikiran oleh masyarakat dan pemerintah kota Palembang untuk dikembangkan, agar perpustakaan Kota Palembang berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan mengingat pentingnya perpustakaan sebagai

⁹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Palembang.

sarana pencerdas bangsa. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang juga masih perlu meningkatkan serta melakukan pembenahan dalam pengelolaan baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, serta mampu menarik perhatian, minat dan keinginan dari masyarakat umum untuk berkunjung ke perpustakaan. Selain itu masih minimnya peneliti yang meneliti tentang pengaruh kebijakan pemerintah kota terhadap eksistensi perpustakaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Keterbatasan bahan pustaka yang menjadikan kurangnya minat pemustaka untuk mengunjungi perpustakaan sehingga membuat eksistensi perpustakaan menurun.
2. Kurangnya perhatian (promosi) terhadap pemustaka sehingga perpustakaan sepi pengunjung.
3. Fasilitas yang kurang memadai bagi pemustaka.
4. Rendahnya minat baca masyarakat.
5. Tata ruang perpustakaan seadanya saja.

6. Peralatan dan perabotan yang belum memperhatikan kenyamanan pemustaka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang?
2. Bagaimana eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang?

D. Batasan Masalah

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas supaya penelitian yang dilakukan penulis lebih terarah dan tidak meluas. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini fokusnya pada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap eksistensi dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang
2. Untuk mengetahui eksistensi dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang.

F. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi tempat penelitian, bagi kelompok masyarakat luas maupun peneliti.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian bisa mengetahui bahwa eksistensi perpustakaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mengingat peran pemerintah yang sangat besar dalam mengembangkan perpustakaan umum di daerahnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perpustakaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat mengembangkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana agar perpustakaan dapat mempertahankan keberadaannya dimata masyarakat.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Pemerintah atau Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa pendefinisian oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa: (1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, (2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administrator publik, dan (3) dikatakan atau disebut sebagai

kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.¹⁰

Selain rumusan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa kajian kebijakan publik merupakan studi yang kompleks, karena pelaksanaan suatu kebijakan publik harus melalui sejumlah tahapan, yaitu: (1) pengidentifikasian dan merumuskan masalah publik, (2) perumusan dan pengagendaaan suatu kebijakan, (3) penganalisaan suatu kebijakan, (4) pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan, (5) pengimplementasian dan pemantauan suatu kebijakan, (6) pengevaluasian suatu kebijakan, apakah telah mencapai hasil sebagaimana desainnya, serta (7) pengkajian dampak dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.¹¹

2. Eksistensi Perpustakaan

Eksistensi adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada. Hal ini kemudian melahirkan empat penjelasan baru tentang eksistensi, antara lain:

- Eksistensi adalah apa yang ada
- Eksistensi adalah apa yang memiliki
- Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada.

¹⁰ Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No.1, 2014, hlm. 3, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019

¹¹ Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", hlm. 3

- Eksistensi adalah kesempurnaan.

Eksistensi perpustakaan yang peneliti maksud adalah bahwa perpustakaan tersebut maju dan berkembang sehingga eksistensinya dapat dipertahankan baik dari segi koleksi terutama sikap pustakawan dalam melayani pemustaka di perpustakaan.

Menurut Zulaikha terdapat kiat-kiat agar perpustakaan dapat tetap eksis : *Pertama, User-Oriented*. Pelayanan informasi untuk pemakai harus mengikuti kebutuhan yang cepat, tepat dan akurat. *Kedua*, pemberdayaan perpustakaan. Dengan bersikap sebagai penyedia informasi maka perpustakaan harus menjadikan informasi sebagai komoditi yang layak jual. *Ketiga*, memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi pemakai perpustakaan.¹²

H. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi salah pengertian dari pembahasan ini, maka penulis mencantumkan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Pengaruh adalah daya yang ada dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk kepercayaan atau watak atau perbuatan orang.¹³

¹² Sri Rohyanti Zulaikha, "Eksistensi Perpustakaan di Era Information Society (Masyarakat Informasi)". *Jurnal Media Informasi*, Vol XIII, No.5 tahun 2000, hlm. 4, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

¹³ Nurbaya, Pengaruh Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang, *Skripsi* (Palembang: Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 22

- b. Kebijakan Pemerintah atau kebijakan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- c. Eksistensi perpustakaan bahwa perpustakaan semakin maju dan berkembang, merata dan meluas secara signifikan baik dalam pengertian fisik dan jumlahnya, jangkauan layanannya, jumlah koleksi dan pengguna perpustakaan.

I. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap beberapa penelitian yang terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan dan menjelaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum ada pembahasan sebelumnya. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Berlianus Again (2013) dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Pelayanan Publik pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perpustakaan, arsip dan kantor dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah. Ulasan teoritis dalam penelitian ini adalah *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance,*

Empathy. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bekerja dengan baik seperti yang diharapkan.

Kedua, Sudirman (2016) dalam Tesisnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung, dan kendala-kendala dalam penerapan implementasi kebijakan. Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu secara mendalam, yang bermaksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data-data yang ada pada perpustakaan Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya pendukung, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaannya kebijakan pelayanan prima belum berjalan baik. Selanjutnya kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung dalam implementasi atau penerapan pelayanan prima adalah masalah sentralisasi dan desentralisasi. Terbatasnya tenaga pengelola, minimnya perhatian universitas terhadap anggaran perpustakaan, dan

perkembangan teknologi informasi membawa dampak tersendiri bagi perkembangan perpustakaan.

Ketiga, Suardi Jupri (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dan kendala yang dihadapi pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam rangka peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dengan cara melalui kebijakan teknis yaitu meningkatkan budaya baca dikalangan masyarakat kabupaten Sinjai dengan kebijakan pemerintah daerah dalam ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai dengan menyediakan buku dan pengembangan budaya baca melalui sosialisasi dan publikasi, upaya meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana. Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam rangka peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai yaitu tidak lain daripada sumber dana (anggaran)

dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Keempat, Sriagustini (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Perpustakaan Umum Pemerintah Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal perpustakaan umum Kabupaten Tulungagung dan merumuskan strategi pengembangan yang tepat untuk dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap input, tahap pencocokan dan tahap keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpustakaan umum Kabupaten Tulungagung berada pada posisi internal dan posisi eksternal rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang saat ini digunakan oleh perpustakaan tersebut belum mampu memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman yang menghadang secara maksimal.

J. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik dan konseptual berupa buku teks yang membahas secara detail tentang berbagai

metode ilmiah, kelebihan dan kelemahannya atau pengkajian terhadap langkah-langkah metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif maka kaidah-kaidah yang dibangun dalam studi ini tentunya akan mengikuti kaidah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini juga dikatakan jenis penelitian lapangan, maka peneliti akan terjun langsung dan mengadakan pengamatan di lapangan seperti situasi dan kejadian yang ada di lokasi.

2. Sumber Penelitian

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa kebijakan pemerintah kota Palembang dan eksistensi perpustakaan yang diperoleh secara langsung dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

¹⁴ Nor Huda (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 23

¹⁵ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 22

- b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam usaha memperoleh keterangan atau data yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Observasi ini ialah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.¹⁷

- b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁸

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.54

¹⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala, pegawai dan pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumen, seperti rekaman, data berbentuk disk, foto-foto dan yang menyangkut penelitian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci seperti banyak dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan , maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 244-247

b. Penyajian Data

Setiap peneliti harus menyajikan data yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan: penyajian data dibuat berwarna, dan bila data yang disajikan cukup banyak maka perlu bervariasi penyajiannya.²⁰

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi adalah aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir (final).²¹ Setelah data itu dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, maka akhirnya peneliti akan menarik kesimpulan yang lebih bermakna dan jelas, memberikan jawaban dari rumusan masalah, tujuan penelitian yang telah peneliti ajukan dalam penelitian ini.

K. Rencana Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan.

²⁰ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 29

²¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11

No	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan dan Pengajuan Proposal						
2	Diskusi Proposal						
3	Perizinan Lapangan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Analisis Data						
6	Penyusunan Laporan Penelitian						
7	Penyajian Laporan						

L. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, rencana penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisikan mengenai pengertian perpustakaan umum, pengertian kebijakan pemerintah, pengertian eksistensi perpustakaan.

Bab III adalah gambaran umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Bab ini berisikan mengenai sejarah singkat dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang, visi, misi dan tujuan, tugas dan fungsi perpustakaan, struktur organisasi, fasilitas, sumber daya manusia dan layanan perpustakaan.

Bab IV adalah hasil penelitian. Bab ini menjawab rumusan masalah berisikan 1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang 3) Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.²²

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (*non book*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.²³

Perpustakaan merupakan tempat untuk menambah ilmu pengetahuan, mendapatkan keterangan atau tempat mencari hiburan. Perpustakaan adalah sebuah gedung atau gedung itu sendiri digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan organisasi yang berperan sebagai sarana pencerdas

²² Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

²³ Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 3

²⁴ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 19

bangsa dengan berbagai koleksi yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka sekaligus wadah yang berperan sebagai sumber informasi dan gerbang ilmu pengetahuan di dunia maupun dunia kerja.

B. Pengertian Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁵

Menurut Herlina perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan di pemukiman penduduk yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat dengan tujuan melayani kebutuhan informasi dan bahan bacaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sumber belajar dan sarana rekreasi sehat (intelektual).²⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan perpustakaan umum adalah perpustakaan yang terbuka untuk umum dan semua lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi sebagai sumber pengetahuan serta diselenggarakan oleh dana umum.

²⁵ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 43

²⁶ Herlina, *Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 25

1. Ciri Perpustakaan Umum

- a. Terbuka untuk umum artinya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, pandangan politik dan pekerjaan.
- b. Dibiayai oleh dana umum. Dana umum ialah dana yang berasal dari masyarakat. Biasanya dikumpulkan melalui pajak dan dikelola oleh pemerintah. Dana ini kemudian digunakan untuk mengelola perpustakaan umum. Karena dana berasal dari umum maka perpustakaan umum harus terbuka untuk umum.
- c. Jasa yang diberikan pada hakikatnya bersifat cuma-cuma. Jasa yang diberikan mencakup jasa memberikan informasi, peminjaman, konsultasi studi sedangkan keanggotaan bersifat cuma-cuma artinya tidak perlu membayar.²⁷

2. Fungsi Perpustakaan Umum

- a. Pendidikan: perpustakaan umum berfungsi memelihara dan menyediakan sarana untuk pengembangan perorangan/kelompok pada semua tingkat kemampuan pendidikan.
- b. Informasi: perpustakaan menyediakan kemudahan bagi pemakai berupa akses cepat terhadap informasi.

²⁷ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 46

- c. Kebudayaan: perpustakaan merupakan pusat kehidupan kebudayaan dan secara aktif mempromosikan partisipasi dan apresiasi semua bentuk seni.
- d. Rekreasi: perpustakaan memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan secara aktif rekreasi dan waktu senggang dengan penyediaan bahan bacaan.²⁸

Jadi dapat disimpulkan fungsi perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai fungsi pendidikan, informasi, kebudayaan, dan rekreasi serta sebagai sarana simpan karya manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Tujuan Perpustakaan Umum

- a. Tujuan menghimpun informasi meliputi kegiatan mencari, menyeleksi, dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai/lengkap dengan baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana dan keinginan pemakai serta mutakhir.
- b. Tujuan mengelola, meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan dan pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri kembali (temu balik informasi) dan diakses oleh pemakai serta merawat bahan pustaka.
- c. Tujuan memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 47-48

Dari pendapat dan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan perpustakaan umum ialah memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka agar dapat membantu mereka dalam mengembangkan suatu informasi dengan cepat dan tepat.

C. Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan akhiran -an maka menjadi kebijakan yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan lain sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³⁰ Kebijakan pada intinya adalah pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, pedoman ini bisa bersifat publik maupun khusus. Publik berarti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya).³¹

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan

²⁹ Wiji Suwarno, *Perpustakaan dan Buku*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 21

³⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 115.

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 705

pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.³² Kebijakan publik biasanya memberi perhatian terhadap masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, akibat tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung juga ikut terlibat.³³

Chandler dan Plano mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.³⁴ Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

³² Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm. 3

³³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm. 77

³⁴ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), hlm. 8

³⁵ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Wi dya Karya, 2012), hlm. 1

mencapai tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Menurut Nugroho ada dua karakteristik dari kebijakan publik sebagai berikut:³⁶

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik³⁷

- a. Tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan sekurang-kurangnya memiliki tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak. Tujuan yang baik harus rasional, artinya merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif

³⁶Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm. 4

³⁷Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, hlm. 17-18

yang diperhitungkan berdasarkan kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang baik berorientasi ke depan, dalam arti: (1) tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan kearah yang diinginkan dan (2) tujuan yang ingin dicapai pada masa depan terletak pada suatu jangka waktu tertentu.

- b. Masalah. Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah yang hendak dipecahkan dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.
- c. Tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena ada dua hal yaitu, (1) terbaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi suatu tujuan telah dicapai.
- d. Dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

2. Proses Kebijakan Publik³⁸

Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

³⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), hlm. 15-16

- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Sementara itu, menurut Anderson proses kebijakan publik adalah sebagai berikut³⁹:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption formulation*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau

³⁹ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, hlm. 14-15

strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik⁴⁰

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai, ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Preferensi nilai, seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sebagainya.

⁴⁰ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm. 15-16.

4. Kebijakan Tentang Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terbentuk berdasarkan *Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016* tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dan khusus Bidang Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia *Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah*. Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai tugas pokok, kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi tentang Kearsipan dan Perpustakaan.⁴¹

D. Eksistensi Perpustakaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁴² Jadi yang dimaksud dengan eksistensi perpustakaan adalah adanya, kedudukannya, posisinya diakui dan dipergunakan. Keberadaannya bukan sekedar statis dan pasif tanpa adanya aktivitas yang nyata. Mesti ada dan hidup, harus dinamis dan aktif dalam mengembangkan berbagai kegiatan perpustakaan.⁴³ Bila dilihat dari sisi organisasi kegiatan bersifat aktif dan dinamis itu seperti pembinaan pengembangan sumber daya manusia, sumber koleksi, kelembagaan, sarana dan prasarana, layanan informasi, peningkatan

⁴¹ Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Desember 2019.

⁴² *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 357.

⁴³ Nurjannah, "Eksistensi Perpustakaan dalam Melestarikan Khazanah Budaya Bangsa". *Jurnal Libria*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 162-163, diakses pada tanggal 28 Januari 2020

kemampuan dan keterampilan pengelola dan lainnya. Kegiatan tersebut mencakup transaksi informasi, sirkulasi koleksi, pemanfaatan, kunjungan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya transfer informasi dari sumbernya di perpustakaan kepada pemakai yang dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Sedangkan yang terlihat dari luar organisasi sifat dinamis dan aktif perpustakaan antara lain terselenggaranya layanan, berkembangnya citra dan kinerja serta manfaat yang dirasakan atau tidak langsung oleh masyarakat.

Eksistensi perpustakaan dapat dilihat dari keberadaannya ditengah-tengah masyarakat penggunaannya.⁴⁴ Keberadaan perpustakaan mampu memberikan kontribusi dan andil, dari sisi lain perpustakaan tumbuh terus dan berkembang dalam arti fisik, non fisik maupun nilai-nilai perpustakaan. Ada dalam arti visualisasi diri yang berwujud dan kasat mata, dan ada dalam arti abstrak tidak terlihat secara fisik, tetapi hanya ditangkap melalui indra perasaan karena memberikan manfaat. Oleh karena demikian masyarakat sebagai pengguna jasa perpustakaan akan menyadari bahwa perpustakaan dan pengelola telah memberikan informasi yang bermanfaat baginya.⁴⁵

Menurut Petr sebagaimana dikutip oleh Nurtakyidah, terdapat lima hal penting yang diungkap oleh responden didalam kajiannya di Benton Study tentang eksistensi perpustakaan. Kelima hal yang dimaksud adalah:

⁴⁴ M. Rizal Pahlevi, "Eksistensi Perpustakaan dan Pengaruhnya Terhadap Minat Baca Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Batanghari Kecamatan Muara Bulian", *Jurnal Al-Tasyrih*, Volume 3, Nomor 1, September 2017, diakses Pada 9 April 2021.

⁴⁵ M. Rizal Pahlevi, "Eksistensi Perpustakaan dan Pengaruhnya Terhadap Minat Baca Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Batanghari Kecamatan Muara Bulian", hlm. 163

1. Penyedia waktu bacaan dan program lain bagi anak-anak.
2. Tempat yang berperan dalam pengadaan buku-buku baru dan bahan cetak lainnya.
3. Tempat yang berperan dalam perawatan dan pembangunan gedung perpustakaan itu sendiri.
4. Penyedia komputer dan layanan *online* bagi anak-anak dan orang dewasa yang membutuhkannya.
5. Penyedia tempat dimana pustakawan membantu seseorang menemukan informasi melalui komputer dan layanan *online*.⁴⁶

1. Ciri-ciri Eksistensi

- a. Motif pokok yaitu cara manusia berada, hanya manusialah yang bereksistensi, dimana eksistensi adalah cara khas manusia berada, dan pusat perhatian ada pada manusia.
- b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif, bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan, setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya.
- c. Di dalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih pada sesama manusia.

⁴⁶ Nurtakyidah, "Eksistensi Perpustakaan di Era Teknologi", *Jurnal Iqra'*, Vol. 11, No. 02, Oktober 2017, hlm. 59, diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

- d. Filsafat eksistensialisme memberi tekanan pada pengalaman konkret, pengalaman eksistensial.⁴⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Perpustakaan

A. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam lembaga perpustakaan yang berhubungan dengan kualitas perpustakaan tersebut, yaitu pengelola, sarana prasarana serta anggaran.

1) Pengelola Perpustakaan (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non-material atau non-finansial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.⁴⁸

a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan

Mengelola perpustakaan tidaklah mudah karena tergantung dari jumlah/kuantitas pengelolanya. Jumlah pengelola perpustakaan harus benar-benar diperhitungkan sehingga segala kegiatan dan tugas-tugas dalam perpustakaan dapat dilakukan secara optimal. Dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Perikanan Nomor PER.29.1/BALITBANG KP/2012 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan disebutkan

⁴⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 187

⁴⁸ Hadari Nawai, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 46

bahwa jumlah sumber daya manusia disetiap perpustakaan sekurang-kurangnya tiga orang agar dapat memberikan layanan yang optimal dan mampu bersaing dengan pusat-pusat informasi lainnya.⁴⁹

b. Kepekaan/sensitivitas

Kemampuan SDM untuk mengetahui kondisi yang berkembang dan memprediksi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi dan memiliki pengaruh terhadap perkembangan perpustakaan sehingga mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sangatlah penting. Seperti yang terjadi saat ini dimana keberadaan lembaga perpustakaan yang dulunya digunakan sebagai pusat yang menyediakan sumber informasi, kini semakin ditinggalkan karena banyaknya sumber informasi yang mampu menyediakan berbagai macam informasi yang dapat diakses secara cepat dan mudah. Saat ini lembaga perpustakaan hanya dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengguna yang dulunya memanfaatkan perpustakaan. Dengan adanya kepekaan/sensitivitas pengelola perpustakaan tentunya akan menyadari bahwa saat ini diperlukan upaya untuk

⁴⁹ Ketut Masiani, "Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi", *Jurnal Pari*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015, hlm. 38, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

mempertahankan keberadaan perpustakaan sebagai lembaga sumber informasi.⁵⁰

c. Kreativitas, inovasi, keahlian, pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola informasi

Kreativitas dan inovasi dalam perpustakaan dapat dilakukan dengan mengolah informasi dan membangun sistem perpustakaan yang dulunya merupakan perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan hibrida ataupun perpustakaan modern (digital), sehingga dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.⁵¹

2) Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan ruangan, rak buku, meja layanan, meja dan kursi baca, telepon, mesin fotocopy, mesin cetak, komputer serta peralatan lain yang diperlukan. Ruangan yang dibutuhkan perpustakaan tergantung dari masing-masing perpustakaan. Ruangan yang disediakan tergantung layanan dan fasilitas yang akan disediakan oleh setiap perpustakaan. Prasarana meliputi tata tertib perpustakaan dan prosedur layanan yang akan dilakukan. Tata tertib disusun disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dilayani dan kebutuhan perpustakaan agar

⁵⁰ Ketut Masiani, "Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi", *Jurnal Pari*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015, hlm. 38, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

⁵¹ Ketut Masiani, "Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi", hlm. 38.

dapat melaksanakan kegiatan layanan dengan nyaman dan tertib. Prosedur layanan sebaiknya disusun sederhana, sehingga tidak terkesan mempersulit akses terhadap fasilitas dan koleksi perpustakaan.⁵²

3) Pengalokasian Dana

Untuk mendukung tercapainya kondisi perpustakaan yang eksis dan siap bersaing, dibutuhkan banyak dukungan dana untuk pengelolaannya sehingga perpustakaan mampu mengelola dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta peningkatan kualitas SDM, dengan penyediaan dana yang memadai maka pengembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan.⁵³

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor pendukung yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan perpustakaan, yaitu perhatian pemerintah terhadap keberadaan lembaga perpustakaan, peran pengguna

⁵² Purwani Istiana, *Layanan Perpustakaan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 9

⁵³ Ketut Masiani, "Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi", *Jurnal Pari*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015, hlm. 40, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

perpustakaan, dukungan masyarakat, serta partisipasi lembaga lain terhadap keberadaan perpustakaan.⁵⁴

1) Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan keberadaan perpustakaan dengan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga perpustakaan baik menyangkut pengelolaan sistem lembaga perpustakaan maupun mengenai sistem informasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada lembaga perpustakaan baik secara materi maupun moril. Dukungan materi dapat berupa pengalokasian dana khusus untuk pengelolaan perpustakaan baik untuk pengembangan koleksi, sarana dan prasarana serta SDMnya. Dengan adanya alokasi dana yang memadai maka lembaga perpustakaan akan dapat dikembangkan sesuai dengan teknologi yang berkembang, memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi serta meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan melalui kegiatan pelatihan, diklat, sekolah atau beasiswa. Dukungan moril dari pemerintah dapat berupa kegiatan yang melibatkan lembaga perpustakaan dalam *event-event* penting/besar sehingga perpustakaan tersebut menjadi lebih dikenal. Menciptakan paradigma dimasyarakat agar perpustakaan

⁵⁴ Ketut Masiani, “Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi”, hlm. 40

menjadi pusat informasi yang penting dan berpengaruh dalam menciptakan generasi-generasi yang berkualitas serta merupakan informasi yang teruji.⁵⁵

2) Pengguna Perpustakaan

Pengguna perpustakaan dengan unit perpustakaan dapat dikatakan memiliki hubungan timbal balik. Suatu perpustakaan tidak akan berfungsi apabila tidak ada pengguna yang memanfaatkan koleksinya. Keaktifan pengguna dalam pemanfaatan perpustakaan akan mendorong berkembangnya perpustakaan. Pengguna perpustakaan juga akan memberikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna. Informasi ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyediakan kebutuhan pengguna serta pengembangan unit perpustakaan sehingga perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi yang ada.⁵⁶

⁵⁵ Ketut Masiani, “Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi”, hlm. 40

⁵⁶ Ketut Masiani, “Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi”, hlm. 40

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam bidang kearsipan dan perpustakaan yakni menyangkut pembinaan, penataan, pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah, swasta, badan usaha milik daerah (BUMD).⁵⁷

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dan khusus bidang perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah. Dalam peraturan peraturan daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok, Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah.

⁵⁷ *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*, diakses pada 5 April 2021 dari <https://jkn.go.id>

Perpustakaan ini telah berbasis teknologi informasi yang telah dibuka oleh Bapak Walikota Palembang di Kota Palembang pada tanggal 19 Desember 2011 dengan program fitur-fitur teknologi informasi tersebut meliputi pendaftaran anggota atau *online register*, penelusuran buku, pemesanan buku, pemeriksa status pinjaman, perpanjangan masa pinjaman, pemuktahiran data anggota, interaksi antar anggota, unggah foto, kirim pesan, interaksi dengan petugas, ganti sandi dan elektronik *book* (e-book). Perkembangan pembangunan Kota Palembang hingga tahun 2013 jelas memberikan dampak yang sangat berarti bagi terlaksananya program kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan tolak ukur kecapaian kinerja meliputi pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosialisasi, pembinaan kearsipan dan perpustakaan unit instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang.⁵⁸

Sejauh perjalanannya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang telah berupaya mewujudkan ketertarikan dan kerjasama antar instansi baik horizontal maupun vertikal melalui koordinasi dalam pembenahan, penataan dan pembinaan kearsipan serta perpustakaan.⁵⁹ Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan pembinaan internal dan eksternal yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 yang meliputi pengembangan sumber daya manusia baik pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan, pameran arsip serta pameran perpustakaan.

⁵⁸ *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*, diakses pada 5 April 2021 dari <https://jkn.go.id>

⁵⁹ Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2019.

Prioritas kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah melakukan pembinaan dan penataan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan swasta serta pembinaan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah Kota Palembang.⁶⁰

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2012 tentang pembahasan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai tiga fungsi diantaranya:⁶¹

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁶⁰ Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2019.

⁶¹ Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2019.

B. Letak dan Tata Ruang Perpustakaan

Letak adalah tempat beradanya sesuatu,⁶² sedangkan ruangan perpustakaan merupakan salah satu faktor yang turut memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan perpustakaan, tanpa ada ruangan tidak akan dapat menjalankan perpustakaan dengan berhasil.⁶³

Dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang memiliki gedung sendiri yang berada di Jalan Bambang Utoyo Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Gedung ini berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Palembang seluas 1500 m² dengan luas gedung perpustakaan 264 m². Bagian pelayanan pengguna berada di depan, ruangan ini juga sekaligus digunakan sebagai ruangan layanan teknis dan administrasi. Ruang koleksi dan baca berada dalam satu ruangan akan tetapi letak koleksi umum dan majalah dibedakan sesuai dengan jenis koleksinya masing-masing, jurnal dan majalah diletakkan dibagian layanan referensi.⁶⁴

C. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi, misi dan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diakses pada 8 Februari 2021 dari <https://kbbi.web.id/>

⁶³ Pawit M. Yusuf Dan Yaya Suhendar, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm. 95

⁶⁴ Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2019.

⁶⁵ Dokumentasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2020.

1. Visi

Mewujudkan Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebagai Lembaga Informasi Terkemuka Guna Mencapai Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera).

2. Misi

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kearsipan dan perpustakaan.
- 2) Mendayagunakan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) kearsipan dan perpustakaan yang professional.
- 3) Meningkatkan penyelawatan dan pelestarian arsip dan bahan pustaka.
- 4) Mengembangkan sadar arsip dan budaya gemar membaca.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan khasanah arsip serta bahan pustaka.

Dilihat dari visi dan misi di atas jelas bahwa pada umumnya suatu perpustakaan memang harus memiliki visi dan misi karena dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi para pengelola perpustakaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemustaka sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar bermanfaat bagi para pemustaka.

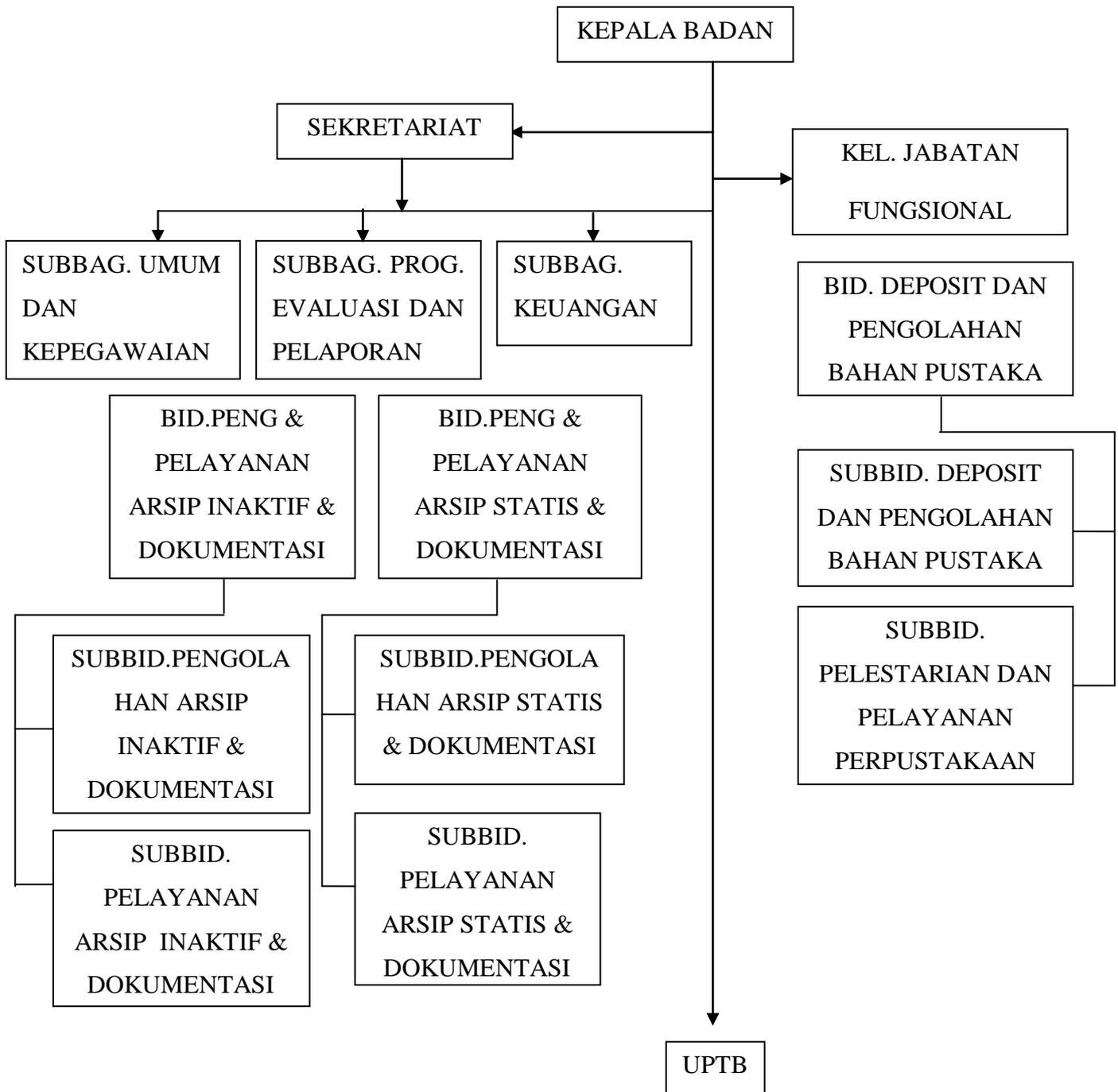
D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012, susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Deposit, Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan membawahi:
 - Sub. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - Sub. Bidang Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan
4. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Inaktif dan Dokumentasi membawahi:
 - Sub. Bidang Pengolahan Arsip Inaktif dan Dokumentasi
 - Sub. Bidang Pelayanan Arsip Inaktif dan Dokumentasi
5. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi membawahi:
 - Sub. Bidang Pengolahan Arsip Statis dan Dokumentasi
 - Sub. Bidang Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi
6. Unit Pelaksana Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Palembang



E. Fasilitas Perpustakaan

Fasilitas perpustakaan perabotan dan peralatan yang harus ada di perpustakaan, perabotan adalah perlengkapan fisik yang diperlukan di ruang perpustakaan sebagai penunjang fungsi perpustakaan berbagai meja kursi kerja dan layanan, rak, lemari, kereta buku dan lain-lain. Peralatan adalah perangkat atau benda yang digunakan sebagai daya dukung pekerjaan administrasi dan pelayanan seperti komputer, printer, scanner, mesin fotocopy, alat baca mikro dan lain-lain.⁶⁶

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang memiliki gedung sendiri yang luasnya kurang lebih 246 m². Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung Kantor	1 buah
2.	Loker Pengunjung	1 set
3.	Rak Sepatu Pengunjung	1 buah
4.	Rak Buku	26 buah
5.	Rak Majalah/Surat Kabar	1 buah
6.	Kursi Baca	16 buah

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kompetensi Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 18

7.	Meja Baca	5 buah
8.	Meja Sirkulasi	1 buah
9.	Koleksi Bahan Pustaka	43.149 eksemplar
10.	Komputer Umum	1 buah
11.	Komputer Kerja	7 buah
12.	Motor Dinas	2 buah
13.	Mobil Dinas	1 buah
14.	Mobil Perpustakaan Keliling	2 buah

Sumber: Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019

Sarana dan prasarana di atas adalah jumlah fasilitas keseluruhan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, fasilitas ini dirawat dengan baik agar pemustaka nyaman berada di perpustakaan. Sesuai dengan standarisasi perpustakaan umum, perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi layanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan pemustaka

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berjumlah dua puluh dua orang, terdiri dari kepala badan, secretariat, bidang pengolahan, bidang pengembangan koleksi dan

pengelola, seksi layanan otomasi dan kerjasama, seksi pelestarian bahan pustaka.⁶⁷ Berikut daftar nama pegawai dan staf pengelola perpustakaan.

Tabel 1.4
Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Kepala Bid. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	1
	- Staf pustakawan DIII Perpustakaan “Octarina Hapsari”	1
2.	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka	1
	- Staf PNS	1
	- Staf Honorer Non PNSD	0
3.	Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	1
	- Staf PNS	0
	- Staf Honorer Non PNSD	3
4.	Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan	1
	- Staf PNS	1
	- Staf Honorer Non PNSD	1
	JUMLAH	11 Orang

Sumber: Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019

⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Ibu Dewi, Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 10 oktober 2020.

Tabel 1.5
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	1
	- Staf pustakawan DIII Perpustakaan “Heni Rusmania, A.Md”	1
2	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	1
	- Staf PNS	1
	- Staf Honorar Non PNSD	1
3	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	1
	- Staf PNS	1
	- Staf Honorar Non PNSD	1
4	Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	1
	- Staf PNS	0
	- Staf Honorar Non PNSD	1
	JUMLAH	10 Orang

Sumber: *Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019*

Tabel 1.6
Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

STATUS	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	SMP	SMA	D III	S1	S2	
PNS	1 Orang			6 Orang	4 Orang	11 Orang
NON PNSD		2 Orang		5 Orang		7 Orang
PNS PUSTAKAWAN			2 Orang			2 Orang
NONPNSD PUSTAKAWAN				1 Orang		1 Orang
TOTAL PEGAWAI BIDANG PERPUSTAKAAN						21 ORANG

Sumber: Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019

Pembagian tugas staf atau pengelola perpustakaan dilakukan oleh kepala badan, pembagian kerja bagi staf disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing staf sehingga diharapkan pekerjaan bisa berjalan dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁶⁸

G. Layanan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang menggunakan sistem layanan terbuka yaitu suatu sistem pelayanan yang memperbolehkan pengguna mencari sendiri buku yang diminatinya di rak untuk dipinjam atau dibaca di tempat.⁶⁹ Memang dengan cara ini tatanan buku di rak akan mudah berubah, tidak rapi dan resiko kehilangan cukup besar tapi dengan adanya

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 15 Maret 2021.

⁶⁹ Yusnimar, "Perpustakaan dan Pelayanan Prima", *Jurnal Al-Maktabah*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2000, Hlm. 89, diakses pada 11 April 2021.

kebebasan melihat bentuk, isi dan ilustrasi buku, pengguna akan lebih tertarik untuk membaca.⁷⁰

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang memiliki beberapa layanan sebagai berikut:

1. Layanan Perpustakaan Umum
2. Layanan Perpustakaan Mobil Keliling Senin s.d Kamis
3. Layanan Perpustakaan Umum dan Mobil Keliling Sabtu
4. Layanan Perpustakaan Mobil Keliling Minggu
5. Layanan Silang Layan bekerjasama dengan pihak ke Dua
 - a. Dinas /Instansi
 - Dinas Kesehatan/10 Puskesmas
 - Rumah Sakit BARI
 - BABINKAMTIBNAS
 - Dit POL AIR
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo
 - Pojok Baca di Kelurahan, Kecamatan dan TBM (15 Pojok Baca)
 - b. Sekolah-Sekolah
 - Sekolah Dasar AL AZHAR 33 Palembang
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Palembang Jalan PDAM
 - c. Taman Bacaan Masyarakat.

⁷⁰ Purwani Istiana, *Layanan Perpustakaan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 8

H. Tata Tertib Pengunjung Perpustakaan

Tata tertib yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah:

1. Pengunjung perpustakaan diwajibkan mengisi daftar kunjungan yang disediakan pada layanan sirkulasi.
2. Menitipkan tas, jaket, topi di tempat penitipan tas atau loker sebelum memasuki ruangan perpustakaan.
3. Memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan ruangan perpustakaan dengan mentaati peraturan dan tata tertib pemanfaatan fasilitas perpustakaan.⁷¹

I. Dana Operasional Perpustakaan

Sejak berdirinya pada tanggal 20 agustus 2008 sampai saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pameran, lomba-lomba, membenahi fasilitas, menambah koleksi serta menjalankan kegiatan perpustakaan keliling dengan menggunakan 3 unit mobil. Sumber dana anggaran perpustakaan berasal dari APBD, APBN dan sumber dana lainnya, berikut adalah komposisi persentase dari alokasi anggaran:⁷²

1. Pengembangan koleksi buku sebanyak 25%
2. Kegiatan lomba-lomba sebanyak 20%
3. Papan promosi 20%
4. Perangkat informasi teknologi 20%

⁷¹ Dokumentasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2020.

⁷² Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 15 Maret 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang ini dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang yang terletak di Jalan Bambang Utoyo Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data-data yang ada di bawah ini didapat penulis melalui proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Maret 2021 dengan menanyakan beberapa hal yang terkait kebijakan pemerintah Kota Palembang dan eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Pertanyaan ini diajukan kepada kepala perpustakaan, pustakawan dan staf perpustakaan di perpustakaan tersebut. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data yang digunakan dari hasil wawancara, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

A. Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dan khusus Bidang Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan kepala Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.⁷³

“Bentuk kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap perpustakaan adalah Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, jadi dalam melakukan tugas setiap layanan yang ada di perpustakaan berpedoman pada Peraturan Walikota tersebut”.⁷⁴

“Kebijakan pemerintah Kota Palembang untuk perpustakaan adalah Peraturan Walikota (PERWALI), dalam perwali ini sendiri dijelaskan apa saja tugas dan fungsi setiap layanan yang ada di perpustakaan. Akan tetapi untuk jumlah koleksi, sarana prasarana dan SDM perpustakaan ini berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP)”.⁷⁵

“Kebijakan Walikota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah Peraturan Walikota no. 64 tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas-tugas dari setiap bagian-bagian perpustakaan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan pemerintah untuk perpustakaan ini adalah Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016, peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016 berisikan tentang susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari bagian-bagian susunan organisasi tersebut sebagai berikut:⁷⁷

⁷³Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2021.

⁷⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁷⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Novi, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁷⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Dewi, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁷⁷Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran.
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan kehumasan dan
- f. Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan

3. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang pengelolaan arsip, layanan dan pemanfaatan arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, layanan dan pemanfaatan arsip. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengelolaan arsip, layanan dan pemanfaatan arsip mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
- b. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja samadengan instansi terkait.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan pustaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang

pengolahan, layanan dan pelestarian bahan pustaka. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan pustaka mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah, pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klarifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data.
- b. Pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan eksistensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya), promosi layanan, melaksanakan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengolahan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan.
- c. Pelaksanaan pelestarian bahan pustaka meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan pustaka dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah

kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran

Membaca

Bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pengembangan perpustakaan dan pemasyarakatan/sosialisasi serta evaluasi pengembangan perpustakaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis kepastakawanan, penilaian angka kredit pustakawan dan tenaga teknis

perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan.

- c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi dan bimbingan serta evaluasi kegemaran membaca.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, untuk jumlah koleksi, sarana prasarana dan jumlah sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berpedoman pada standar nasional perpustakaan (SNP).

B. Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsure bertahan.⁷⁸ Berbicara mengenai eksistensi perpustakaan sudah pasti ada kaitannya dengan berjalan atau tidaknya suatu sistem perpustakaan, setiap perpustakaan diharapkan mampu menarik serta melayani para pemustaka dengan baik sehingga pemustaka akan merasa nyaman dan betah berada di perpustakaan. Berbagai

⁷⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 357.

upaya dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam mempertahankan eksistensinya dimata pemustaka, mulai dari promosi perpustakaan hingga perpustakaan keliling.

Promosi perpustakaan adalah hal penting yang perlu dilakukan dalam sebuah perpustakaan, promosi bertujuan untuk memfasilitasi informasi antara perpustakaan dan calon pengguna karena keberhasilan suatu perpustakaan dapat dilihat dari tingkat kunjungan pengguna dan pemanfaatan informasi oleh pengguna.⁷⁹

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Perpustakaan

a. Pengelola Perpustakaan (Sumber Daya Manusia)

Pada dasarnya maju atau mundurnya sebuah perpustakaan akan sangat ditentukan oleh manusia-manusia yang mempunyai ide, gagasan dan konsep yang cemerlang dan mempunyai semangat untuk mengabdikan dirinya kepada kemajuan organisasi dalam hal ini perpustakaan.⁸⁰ Maju mundurnya sebuah perpustakaan ditentukan oleh pengelola perpustakaan yang mengelola perpustakaan itu sendiri, semua fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan dan koleksi semua dikelola oleh pustakawan. Apabila semua itu dikelola dengan baik maka kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna perpustakaan. Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang

⁷⁹Stanton J. William, *Prinsip Pemasaran Jasa*, terjemahan Yohanes Lamarto, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 138

⁸⁰Rode Ester Frida Mangapeng. "Peranan Pengelola Perpustakaan dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Siswa SMP Negeri Empat Manado", *E-Journal "Acta Diurnal"*, Vol. V, No. 3, Tahun 2016, diakses pada tanggal 7 April 2021.

menggerakkan sumber daya lain dalam organisasi perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, pustakawan menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyebarluasan informasi di perpustakaan.⁸¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengelola perpustakaan di perpustakaan Kota Palembang berjumlah 21 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SMP, SMA, DIII, S1 dan S2

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas merupakan keseluruhan yang dimiliki perpustakaan, dengan adanya fasilitas yang lengkap pemustaka dapat dipermudah dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Fasilitas yang ada dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan perpustakaan, apakah fasilitas yang ada lengkap atau tidak.

Sarana dan prasarana perpustakaan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber mengenai sarana dan prasarana di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, sarana dan prasarana di perpustakaan sangat penting untuk kelancaran kegiatan di perpustakaan. Oleh karena itu juga sangat dibutuhkan dalam melengkapi sarana di dalam perpustakaan sehingga dapat digunakan dalam mencapai suatu tujuan bersama, sarana yang memadai juga

⁸¹Ahmad Yani, *Kesiapan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Terhadap Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah*, (Jakarta: Universitas Bakrie, 2014), hlm. 1

sangat mempermudah pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di perpustakaan Kota Palembang: Kelebihan sarana yang ada di perpustakaan Kota Palembang sudah memiliki aspek-aspek yang memenuhi standar perpustakaan seperti kursi, meja, AC, kipas angin, computer umum, computer kerja, rak buku, loker, rak majalah, rak sepatu, printer dan mobil perpustakaan keliling. Berdasarkan keterangan di atas ternyata masih memiliki kekurangan yang harus dilengkapi agar sarana di perpustakaan Kota Palembang lebih efisien dan membuat pemustaka merasa nyaman saat berkunjung ke perpustakaan. Sehingga perlu adanya penambahan sarana yang ada di perpustakaan Kota Palembang seperti mesin fotocopy, televisi, rak koleksi referensi serta sarana yang masih perlu ditambah.

“kalau dilihat sarana yang ada di perpustakaan sudah memadai akan tetapi masih ada yang kurang yaitu CCTV, dan computer untuk mengakses koleksi digital dan perlu penambahan sarana seperti kursi baca, meja, loker penyimpanan dan penambahan koleksi.”⁸²

Berdasarkan pengamatan peneliti sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan Kota Palembang sudah memadai sehingga proses kegiatan perpustakaan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang harus dilengkapi sehingga sarana yang disediakan lebih optimal.

⁸²Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 5 April 2021.

c. Pengalokasian Dana

Untuk mendukung tercapainya kondisi perpustakaan yang eksis dan siap bersaing, dibutuhkan banyak dukungan dana untuk pengelolaannya sehingga perpustakaan mampu mengelola dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta peningkatan kualitas SDM, dengan penyediaan dana yang memadai maka pengembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan.

“dana kami berasal dari anggaran APBD, dana ini digunakan untuk membenahi fasilitas yang ada di perpustakaan, mengadakan lomba-lomba antar sekolah dan menambah koleksi buku.”⁸³

“anggaran perpustakaan ini berasal APBN dan APBD, anggaran ini digunakan untuk promosi perpustakaan seperti membuat brosur, kami juga selalu mengadakan lomba antar sekolah.”⁸⁴

“anggaran dana perpustakaan berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran ini digunakan untuk menambah koleksi, membenahi sarana dan prasarana, mengadakan lomba, pameran, serta menjalankan kegiatan perpustakaan keliling”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berasal dari APBN dan APBD, dana ini digunakan untuk kepentingan perpustakaan seperti membenahi sarana dan prasarana, melakukan promosi perpustakaan (brosur dan pameran), pengadaan lomba antar sekolah, menambah koleksi dan lain-lain.

⁸³Wawancara Pribadi dengan Pak Eko, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁸⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁸⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Novi, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

d. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan keberadaan perpustakaan dengan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga perpustakaan baik menyangkut pengelolaan sistem lembaga perpustakaan maupun mengenai sistem informasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada lembaga perpustakaan baik secara materi maupun moril. Dukungan materi dapat berupa pengalokasian dana khusus untuk pengelolaan perpustakaan baik untuk pengembangan koleksi, sarana dan prasarana serta SDMnya.

e. Pengguna Perpustakaan

Setiap orang yang membutuhkan informasi disebut pengguna perpustakaan. Menurut Suwarno, pengguna perpustakaan adalah pengguna fasilitas yang telah disediakan perpustakaan baik koleksi buku maupun fasilitas lainnya.⁸⁶ Sedangkan menurut Yusuf, pengguna atau pemakai jasa perpustakaan adalah semua pengunjung perpustakaan yang bertujuan menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mencari informasi dalam rangka memperoleh bahan pustaka atau pengetahuan.⁸⁷

Suatu perpustakaan tidak akan berfungsi apabila tidak ada pengguna yang memanfaatkan koleksinya. Keaktifan pengguna dalam pemanfaatan perpustakaan akan mendorong berkembangnya

⁸⁶Wiji Suwarno, *Psikologi Perpustakaan*, (Jakarta: Sageng Seto, 2009), hlm. 80

⁸⁷Rahayu Ningsih, *Pengelolaan Perpustakaan*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), hlm.

perpustakaan. Pengguna perpustakaan juga akan memberikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna.

Tabel 1.7
DATA REKAP PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN UMUM

NO	BULAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	JANUARI	520 orang	554 orang	677 orang	420 orang	446 orang
2	FEBRUARI	390 orang	780 orang	623 orang	338 orang	372 orang
3	MARET	523 orang	810 orang	565 orang	420 orang	394 orang
4	APRIL	724 orang	778 orang	512 orang	438 orang	413 orang
5	MEI	552 orang	869 orang	510 orang	391 orang	354 orang
6	JUNI	558 orang	969 orang	389 orang	184 orang	265 orang
7	JULI	400 orang	439 orang	356 orang	516 orang	471 orang
8	AGUSTUS	408 orang	748 orang	549 orang	444 orang	391 orang
9	SEPTEMBER	759 orang	1,117 orang	407 orang	432 orang	362 orang
10	OKTOBER	640 orang	773 orang	481 orang	452 orang	268 orang
11	NOVEMBER	793 orang	965 orang	578 orang	495 orang	206 orang
12	DESEMBER	579 orang	790 orang	464 orang	420 orang	200 orang
TOTAL PENGUNJUNG		6,846 orang	9,592 orang	6,111 orang	4,950 orang	4,142 orang

Sumber: *Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019*

Tabel 1.7 menunjukkan perubahan jumlah pengunjung setiap tahunnya pada perpustakaan umum. Perubahan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pengunjung yang tidak stabil, dari data di atas jumlah pengunjung yang mengalami peningkatan adalah pada tahun 2016. Sedangkan data jumlah pengunjung yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019. Dapat dilihat

pengunjung perpustakaan umum menurun setiap tahunnya dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2016.

Tabel 1.8
DATA REKAP PENGUNJUNG MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING

NO	BULAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	JANUARI	700 orang	378 orang	1,103 orang	2,625 orang	2.999 orang
2	FEBRUARI	680 orang	395 orang	1,246 orang	3,196 orang	3.009 orang
3	MARET	913 orang	<i>Penilaian Lomba Tingkat SMA</i>	1,183 orang	3,812 orang	2.770 orang
4	APRIL	1,414 orang	<i>Penilaian Lomba Tingkat SMA</i>	1,228 orang	3,824 orang	3.112 orang
5	MEI	1,501 orang	<i>Penilaian Lomba Tingkat SMP</i>	<i>Puasa/Idul Fitri</i>	1,651 orang	523 orang
6	JUNI	405 orang	<i>Penilaian Lomba Tingkat SMP</i>	<i>Puasa/Idul Fitri</i>	<i>Puasa/Idul Fitri</i>	501 orang
7	JULI	<i>Puasa/Idul Fitri</i>	<i>Puasa/Idul Fitri</i>	1,319 orang	2,460 orang	2.113 orang
8	AGUSTUS	747 orang	415 orang	1,802 orang	3,518 orang	3.023 orang
9	SEPTEMBER	730 orang	528 orang	562 orang	3,391 orang	2.816 orang
10	OKTOBER	568 orang	514 orang	1,344 orang	4,456 orang	3.161 orang
11	NOVEMBER	333 orang	1,496 orang	1,215 orang	2,099 orang	2.348 orang
12	DESEMBER	0 orang	<i>Libur Sekolah</i>	1,425 orang	2,500 orang	3.099 orang
TOTAL PENGUNJUNG		7,991 orang	3,726 orang	12,427 orang	33,532 orang	29,474 orang

Sumber: *Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bulan Desember 2019*

Tabel 1.8 menunjukkan perubahan jumlah pengunjung setiap tahunnya pada mobil perpustakaan keliling. Perubahan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pengunjung yang tidak stabil, dari data di atas jumlah pengunjung yang mengalami peningkatan adalah pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Sedangkan data jumlah pengunjung yang mengalami penurunan terjadi pada tahun 2016 dan 2019.

2. Upaya Dinas Kearsipandan Perpustakaan Kota Palembang dalam Meningkatkan Eksistensi Perpustakaan

- a. Bimtek Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan/Taman Bacaan Masyarakat/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri Swasta se-kota Palembang.
- b. Membuat dan Menyebarkan Brosur Mengenai Perpustakaan Kota Palembang.
- c. Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling ke Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Tempat Umum.
- d. Sosialisasi Perpustakaan ke Sekolah-sekolah.
- e. Monitoring Perpustakaan Masjid di 152 Masjid se-Kota Palembang.
- f. Kegiatan Lomba – lomba.
- g. Kegiatan Promosi ke Taman Bacaan/Pojok Baca/Kelurahan/Kecamatan.

- Mendongeng di Taman Bacaan TK/TPA/PAUD Cahaya Alam.
 - Mendongeng Kunjungan Ke SD FILAIL 65 Pulau Kemaro.
 - Mendongeng di Taman Bacaan Kelurahan Bukit Sangkal.
- h. Mengisi Talk Show di Radio El shinta , TVRI dan Pal TV.⁸⁸

Menurut ibu Heni selaku pustakawan di perpustakaan Kota Palembang mengatakan:

“Dalam mempertahankan eksistensinya perpustakaan selalu melakukan promosi dengan perpustakaan keliling, jadi kami memiliki tiga mobil perpustakaan keliling yang mengunjungi sekolah-sekolah dasar dan smp, perpustakaan ini juga sering mengadakan lomba-lomba mendongeng, membaca puisi dan lain sebagainya, walaupun sedang pandemi covid-19 perpustakaan selalu siap melayani pemustaka”.⁸⁹

Sementara itu, menurut ibu Novi selaku staf perpustakaan di perpustakaan Kota Palembang mengatakan:

“Perpustakaan Kota Palembang mengadakan berbagai promosi perpustakaan misalnya perpustakaan keliling, menyediakan koleksi untuk taman bacaan, menyebarkan brosur tentang perpustakaan dan lain-lain mengingat banyaknya masyarakat yang enggan untuk mengunjungi perpustakaan, bahkan selama pandemi pengunjung perpustakaan sangat sedikit”.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan kota Palembang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya, seperti kunjungan mobil perpustakaan

⁸⁸Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, 2021.

⁸⁹Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

⁹⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Novi, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

keliling ke sekolah-sekolah, pengadaan lomba, menyebarkan brosur dan lain-lain. Pada dasarnya tujuan dari promosi perpustakaan adalah untuk memperkenalkan kepada pemustaka bahwa perpustakaan adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat koleksi dan informasi lainnya.

C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Pemerintah Kota Palembang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perpustakaan umum di daerahnya terutama dalam hal memberikan dukungan materi berupa pengalokasian dana khusus untuk pengelolaan perpustakaan. Hal inilah yang kiranya dapat mendorong perlunya pemikiran oleh masyarakat dan pemerintah kota Palembang untuk dikembangkan, agar perpustakaan Kota Palembang berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan mengingat pentingnya perpustakaan sebagai sarana pencerdas bangsa.

Berdasarkan Peraturan Walikota bagian kelima pasal 11 ayat 2 dijelaskan mengenai layanan eksistensi:

“Pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan eksistensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya), promosi layanan, melaksanakan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengolahan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan”.⁹¹

⁹¹Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki pengaruh penting dalam mempertahankan keberadaan perpustakaan dengan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga perpustakaan baik menyangkut pengelolaan sistem lembaga perpustakaan maupun mengenai sistem informasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada lembaga perpustakaan baik secara materi maupun moril.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah Kota Palembang sangat berperan penting dalam menumbuh kembangkan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang baik dalam memberikan pengalokasian dana maupun memberikan dukungan lainnya. Perpustakaan Kota Palembang juga sudah melakukan berbagai cara dalam mempromosikan perpustakaan agar masyarakat dapat mengenal pentingnya keberadaan perpustakaan dan dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam melakukan tugas setiap layanan berpedoman pada PERWALI.
2. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang masih terbilang rendah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang antara lain:
 - Sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berjumlah 21 orang dengan tingkat pendidikan

yang berbeda-beda, tenaga pustakawan hanya dua orang PNS pustakawan dan satu orang NONPNSD pustakawan.

- Sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sudah memadai.
- Pengalokasian dana berasal dari APBN dan APBD.
- Peran pemerintah.
- Pengguna perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mengalami perubahan jumlah pengunjung setiap tahunnya, perubahan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil.

Adapun upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam meningkatkan eksistensi perpustakaan antara lain: bimbingan teknologi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, menyebar brosur, kunjungan mobil perpustakaan keliling, sosialisasi perpustakaan, monitoring perpustakaan, kegiatan lomba, promosi dan mengisi Talk Show di radio.

3. Pemerintah Kota Palembang memiliki pengaruh penting dalam mempertahankan eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang seperti menentukan kebijakan terhadap perpustakaan Kota Palembang yaitu Peraturan Walikota Palembang No. 64 Tahun 2016 yang berisi tentang tugas-tugas setiap layanan di perpustakaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan merupakan harapan dari penulis agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dapat meningkatkan eksistensinya.

Beberapa saran sebagai masukan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- Penelitian ini kiranya dapat dijadikan gambaran dan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.
- Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan eksistensi perpustakaan.

2. Saran Bagi Perpustakaan dan Pemerintah

- Pihak perpustakaan sebaiknya memperbanyak sumber daya manusianya terutama tenaga pustakawan mengingat peranannya yang sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang diharapkan dapat melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada agar

pelayanan perpustakaan lebih optimal mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perpustakaan.

- Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian khusus kepada lembaga perpustakaan baik secara materi maupun moril.

3. Saran Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan pengaruh kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Yani. (2014). *Kesiapan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Terhadap Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah*. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Amaliah. "Upaya Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Umum Daerah Kota Tangerang," *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Desember 2019.
- Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Maret 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: kompetensi dasar pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dokumentasi, dinas kearsipan dan perpustakaan kota Palembang, 2020.
- Eko Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Eko Putro Widoyoko. (2017) *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari Nawai. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlina. (2006). *Ilmu perpustakaan dan Informasi*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim Bafadal. (1996). *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ilham Arief Sirajuddin. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No.1, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada 8 februari 2021 dari <https://kbbi.web.id/>
- Ketut Masiani. "Mempertahankan Keberadaan Perpustakaan Khusus dalam Globalisasi Informasi". *Jurnal Pari*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015.
- Larasati Milburga. (1991). *Membina Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lorens Bagus. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Rizal Pahlevi. "Eksistensi Perpustakaan dan Pengaruhnya Terhadap Minat Baca Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Batanghari Kecamatan Muara Bulian". *Jurnal Al-Tasyrih*, Volume 3, Nomor 1, September 2017
- Nanang Martono. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nor Huda (ed.). (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah.
- Nurbaya. "Pengaruh Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang," *Skripsi*. Palembang: Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013.
- Nurjannah. "Eksistensi Perpustakaan dalam Melestarikan Khazanah Budaya Bangsa," *Jurnal Libria*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2017).
- Nurtakyidah, "Eksistensi Perpustakaan di Era Teknologi", *Jurnal Iqra'*, Vol. 11, No. 02, Oktober 2017.
- Pawit M. Yusuf Dan Yaya Suhendar. (2005). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Peraturan Walikota Palembang Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2016.
- Purwani Istiana. (2014). *Layanan Perpustakaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rode Ester Frida Mangapeng. “Peranan Pengelola Perpustakaan dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Siswa SMP Negeri Empat Manado”, *E-Journal “Acta Diurnal”*, Vol. V, No. 3, Tahun 2016.
- Sri Rohyanti Zulaikha. “Eksistensi Perpustakaan di Era Information Society (Masyarakat Informasi),” *Jurnal Media Informasi*, Vol XIII, No.5 tahun 2000.
- Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Perpustakaan Nasional RI 2011.
- Stanton William J. (1996). Prinsip Pemasaran Jasa. Terjemahan Yohanes Lamarto Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2014). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno NS. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Taslima Yusuf. (1997). *Manajemen Perpustakaan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tim Penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Wawancara Pribadi dengan Ibu Dewi, Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 10 oktober 2020.
- Wawancara Pribadi dengan Ibu Heni, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 15 Maret 2021.
- Wawancara Pribadi dengan Ibu Novi, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.
- Wawancara Pribadi dengan Pak Eko, Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Palembang, 12 Maret 2021.

W. Gulo. (2000). *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wiji Suwarno. (2011). *Perpustakaan dan Buku*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Yusnimar, "Perpustakaan dan Pelayanan Prima," *Jurnal Al-Maktabah*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2000

BIODATA PENULIS



Okтин Yulista lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1997. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan bapak Marpin dan ibu Martini. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 04 Tanjung Lalang.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Payaraman dan melanjutkan pendidikan ke sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2015, mengambil program studi Ilmu Perpustakaan di Fakultas Adab dan Humaniora. Akhirnya penulis telah menyelesaikan program studi pada tahun 2021, dengan judul skripsi “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B- 2424 /Un.09/IV.1/PP.01/92/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan *a.n Oktin Yulista*, tanggal, 24 Januari 2019

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 31 tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.	19701114 200003 1 002	Pembimbing I
Misroni., S.Pd., M. Hum.	19830203 201403 1 001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara:

N a m a : Oktin Yulista
N I M : 1534400055
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi :

"Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terhadap Eksistensi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 27 September 2019 s/d 27 September 2020

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 27 September 2019

D e k a n,



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Dosen Penasihat Akademik yang bersangkutan;
4. Dosen Pembimbing
5. Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan;
6. Arsip;

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.adab.radenfatah.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. Zainal Abiding Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 E-mail: prodi.perpus@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PRODI ILMU PERPUSTAKAAN

NAMA : OKTIN YULISTA
 NIM : 1534400055
 PEMBIMBING I : Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Kebijakan pemerintah kota Palembang Terhadap
 Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

No.	Hari/Tanggal	Permasalahan	Paraf
01.	Senin, 20/01-2020	1. Alasan penulisan 2. Konsep lama penulisan 3. Teknik penulisan	<i>[Signature]</i>
02	Kamis, 20/08-2020	Perbaiki teknik penulisan rujukan yang berasal dari jurnal dan skripsi	<i>[Signature]</i>
03	Jumat, 03/07-2020	* Teknik penulisan * Sumbangan teori diperjelas * Sumber wawancara	<i>[Signature]</i>
04	Selasa, 01-09-2020	* Ace dengan saran. * Sistematika di perbaiki * Daftar pustaka ganti daftar rujukan	<i>[Signature]</i>
05.	Rabu, 07/10-2020	* Perbaiki penulisan * Teknik penulisan, sistematika * Referensi diperbaiki	<i>[Signature]</i>
06.	Rabu, 14/10-2020	1. Beberapa bagian yg ditanda agar diperbaiki 2. Kebijakan nasional/kelemb. perpustakaan?	<i>[Signature]</i>
07.	Jumat, 16/10-2020	1. Ace bab II 2. Dapat dilanjutkan ke bab selanjutnya	<i>[Signature]</i>

No.	Hari/Tanggal	Permasalahan	Paraf
08.	Kamis. 24/12 - 2020	* Perkarya referensi * Uraian bisa dari wawancara dan observasi * Teknik penulisan	G
09.	Selasa. 02/03 - 2021	* Referensi agar ditambah * Bab III harus lebih tebal dari bab II * format penulisan	G
10.	Selasa 06/04 - 2021	* Identitas sumber di perjelas * Referensi agar di perkarya	G
11.	Senin 19/04 2021	* Bab IV harus lebih tebal dari bab sebelumnya * Silahkan lanjutkan ke bab selanjutnya	G
12.	Senin 24/05 2021	* format penulisan	G
13.	Rabu 26/05 2021	Acc bab IV Silahkan lanjutkan ke bab selanjutnya	G
14.	Kamis 27/05 2021	Perbaiki saran.	G
15.	Sabtu 29/05 2021	Acc Bab V Silahkan lengkapi persyaratan ujian munaqasyah	G
16.	Senin 31/05 2021	Siap di ujian	G

Palembang, 2018
Pembimbing I,



NIP.



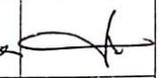
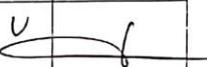
**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abiding Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 E-mail. prodi.perpus@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PRODI ILMU PERPUSTAKAAN

NAMA : Oktin Yulista
NIM : 1534900053
PEMBIMBING II : Misroni, M.Hum
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Kebijakan pemerintah kota Palembang Terhadap
Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

No.	Hari/Tanggal	Permasalahan	Paraf
1.	29-10-2019	* Permasalahan id 1B belum runtut # teori dan fenomena - alasan UH sistem	
2.	4-12-2019	* Alasan belum terdapat / terdapat # teori masih mistik	
3	10-1-2020	* Alasan tt hubungan SPA - Perguruan th eksistensi di hubungan	
4	16-1-2020	* Ditentukan pemahaman tt reaktor # ACC BAB I	
5	4-2-2020	* Tambahkan tt teori eksistensi # Bab Resume tetapi pisau analisis di Bab IV main	
6	3-3-2020	* masih mistik teori # pisau analisisnya nanti skt apa	
7	01-04-2020	* Tambahkan teori eksistensi # dan sumber utama	

No.	Hari/Tanggal	Permasalahan	Paraf
8	2-09-2020	* Usahakan cari sumber asli * Acc Bab 2 lanjut ke bab 3	
9	2-11-2020	* Tambah ke awal yang sudah sudah * Acc Bab II	
10	15-1-2021	# Sejalan wawancara sumber lain * Lembar wawancara ke ke buku FA * dan karna asli ke ke buku ACC	
11	1-4-2021	# Perbaikan ttg poster Perubahaan Tikun dan tema logo dan	
12	2-6-2021	# ACC Bab IV lanjut ke Bab V r.	
13	3-6-2021	# Bab V harus mendawab dan Rn. # ACC BAB V	
14	3-6-2021	# Halaman cover harus (revisi) * Abstrak ditulis dan di buat file dan	
15	09-06-2021	Acc di ujikan	

Palembang, 07 JUNI 2021
Pembimbing II,



Misroni, S.pd.I., M.Hum

NIP. 19830203 201403 1 001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B- 1718 /Un.09/IV.1/PP.01/12/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor KESBANGPOL
Provinsi Sumatera Selatan
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1	Oktin Yulista/ 1534400055	S1 Ilmu Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terhadap Eksistensi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 28 Desember 2020 – 31 Maret 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Desember 2020

Dekan

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Palembang?
2. Apa bentuk kebijakan yang telah dibuat?
3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut?
4. Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi perpustakaan?
5. Apa saja upaya yang dilakukan dinas kearsipan dan perpustakaan kota Palembang dalam meningkatkan eksistensi perpustakaan?
6. Bagaimana eksistensi perpustakaan setelah upaya tersebut dilakukan?